

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai periode yang sangat krusial bagi Indonesia dalam mendapatkan momentum untuk mengakhiri masa krisis akibat pandemi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi instrumen utama kebijakan fiskal dalam menjaga arah pertumbuhan ekonomi agar tetap positif. Pemerintah mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” dengan harapan agar perekonomian Indonesia segera *rebound* dengan merata dan mendorong keunggulan kompetitif Indonesia dalam jangka panjang.

Gambar I.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi *y-on-y*



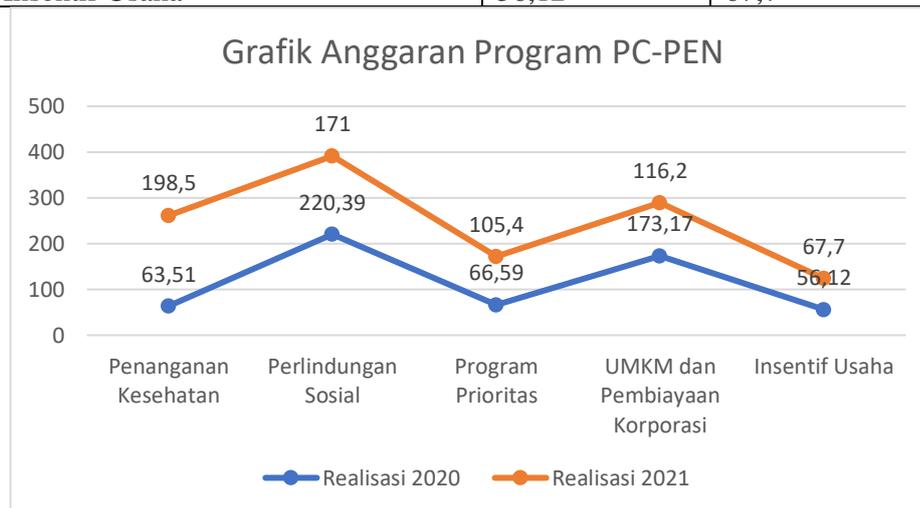
Sumber: Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022)

Setelah pertumbuhan ekonomi sempat berkontraksi sepanjang tahun 2020 pada angka -2,07%, kinerja APBN menunjukkan performa positif hingga mencapai angka 3,69% pada 2021. Fenomena ini terwujud berkat skema cepat tanggap yang disusun pemerintah selama 2 tahun. Terhitung sejak tahun anggaran (TA) 2020, APBN menjadi instrumen fiskal yang diarahkan untuk fokus mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai dari segi belanja negara, transfer ke daerah, hingga pembiayaan. Dukungan-dukungan ini mampu direalisasikan dalam waktu yang singkat berkat sinergi Pemerintah dan DPR.

APBN 2020 yang mulanya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 dapat dilakukan penyesuaian/pergeseran anggaran setelah diberikan fleksibilitas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sehingga program-program PEN dapat lekas terealisasi. Postur atas penyesuaian anggaran tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Relaksasi anggaran ini dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendanai program penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat yang diwujudkan dalam 6 program utama Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Tabel I.1 Tabel dan Grafik Anggaran Program PC-PEN

Kebijakan Dukungan	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Penanganan Kesehatan	63,51	198,5
Perlindungan Sosial	220,39	171
Program Prioritas	66,59	105,4
UMKM Pembiayaan Korporasi	173,17	116,2
Insentif Usaha	56,12	67,7

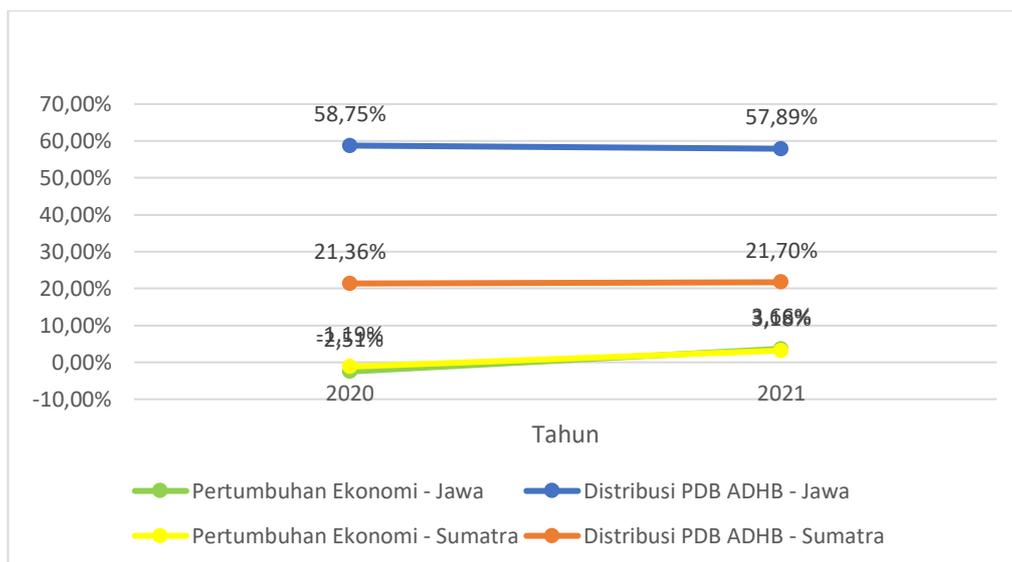


Sumber: Konferensi Pers Realisasi (Sementara) APBN 2021 Kementerian Keuangan

Momentum kembalinya kondusifitas perekonomian berlangsung seiring dengan peningkatan laju vaksinasi massal yang merupakan salah satu prioritas PC-PEN. Di sisi lain, konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi tetap berada pada tren positif (Puspasari, 2021). Perlahan namun pasti, berbagai sinyal optimis membawa Indonesia memasuki masa pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) yang ditunjukkan pada tabel Gambar I.1 terus memperlihatkan tren positif dimulai dari Q II 2020, sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan kutipan Badan Pusat Statistik (BPS), PDB merupakan nilai dari jumlah hasil akhir seluruh barang dan jasa dalam suatu negara yang menjadi

parameter fundamental dalam menaksir kondisi perekonomian. BPS kemudian melaporkan bahwa secara spasial distribusi PDB Indonesia masih ditopang oleh Pulau Jawa dan Sumatera pada 2020 dan 2021.

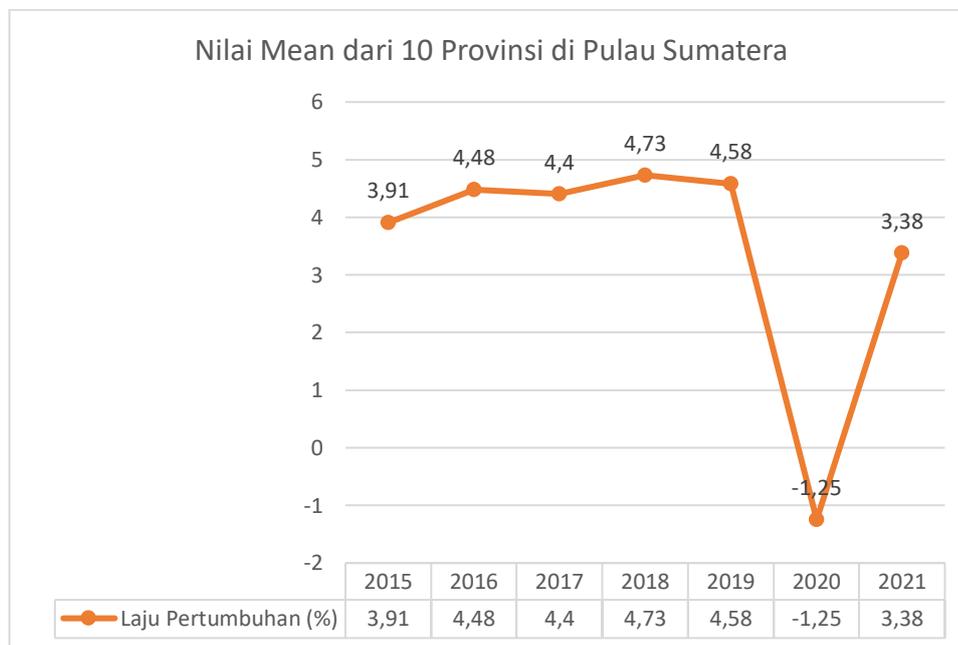
Gambar I.2 Grafik PDB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa-Sumatera



Sumber: Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022)

Meskipun secara keseluruhan didominasi Pulau Jawa, namun Pulau Sumatera menunjukkan performa ekonomi yang menarik. Pulau Sumatera menyumbang PDB dengan margin yang lebih besar serta kontraksi ekonomi yang lebih kecil pada 2020 bila dibanding Pulau Jawa. Lebih dari itu, terhitung sejak tahun 2015-2019 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera relatif konstruktif.

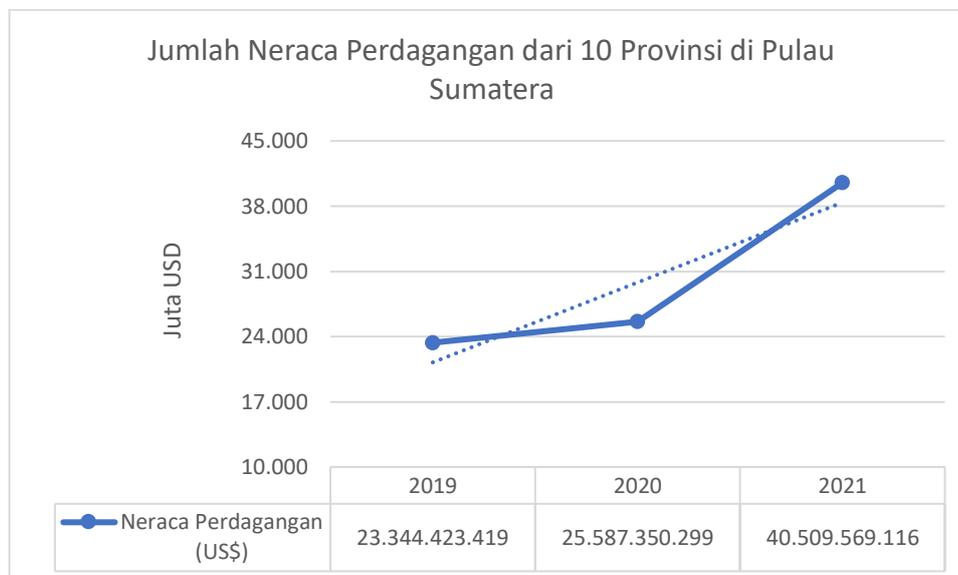
Gambar I.3 Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik (Logaritma, 2022)

Pertumbuhan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah riil barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar. Artinya bila merujuk pada teori pertumbuhan ekonomi Keynes, berdasarkan Tabel I.2, Pulau Sumatera secara mandiri sudah memiliki aktivitas produksi barang dan jasa yang cukup baik yang berasal dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah daerah, serta net ekspor sendiri (Murialti, 2020). Sementara itu menurut Arsyad (dalam Desniarti, 2016), teori Solow-Swan mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada bertambahnya ketersediaan faktor-faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, serta kemajuan teknologi. Faktor-faktor produksi ini lah yang kemudian membentuk pola aktivitas perdagangan di Pulau Sumatera.

Gambar I.4 Neraca Perdagangan Sumatera



Sumber: diolah dari BPS dan Kementerian Perdagangan (2022)

Terbukti, aktivitas perdagangan Pulau Sumatera justru menunjukkan peningkatan yang konsisten bahkan pada masa pandemi. Neraca perdagangan yang surplus sangat lah penting pada masa resesi karena akan membantu penyediaan lapangan kerja dan peningkatan *demand* atas barang dan jasa (Wardana, 2020). Maraknya kegiatan-kegiatan produksi serta berputarnya roda-roda perdagangan tentu disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya, seperti kawasan pabrik, perkantoran, hingga kemudahan jalur transportasi. Pemerintah dalam hal ini turut hadir dan berperan aktif menjadi katalisator perekonomian, terutama dalam rangka membawa misi pemerataan pemulihan ekonomi.

Konektivitas antardaerah dianggap mampu menjadi solusi terwujudnya pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan proyek jangka panjang pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang diserahkan kepada PT Hutama Karya (Persero)

sejak tahun 2015. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, sejalan dengan misi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali mengalokasikan sejumlah dana penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Utama Karya (Persero) untuk meneruskan pembangunan JTTS. Sebagian dari dana PMN ini dikategorikan sebagai PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional atau PMN PEN. Program ini termasuk dalam kelompok kebijakan “Dukungan terhadap UMKM dan Pembiayaan Korporasi” berdasarkan Tabel I.1.

Meskipun demikian, terdapat beberapa argumen kontra yang dikemukakan terhadap program pemerintah ini. Penggunaan dana cadangan PEN untuk pembangunan jalan tol sejatinya tidak memiliki korelasi yang jelas terhadap pemulihan ekonomi. Dana cadangan PEN juga dianggap sebagai istilah yang tidak ada dalam nomenklatur APBN. Lebih lanjut, alokasi yang bersumber dari pemanfaatan SAL juga dipertanyakan dasar hukumnya mengingat SAL baru terbentuk setelah *cut off* 2021, namun sudah dianggarkan terlebih dahulu untuk PMN (Komisi XI DPR RI, 2021).

Persoalan di atas sangat relevan dengan fase terkini pandemi yang sedang beralih ke masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengulasnya lebih lanjut untuk mengungkap praktik akuntansi investasi pemerintah dan mendapatkan jawaban atas hubungan antara kebijakan PMN dan Program PEN melalui karya tulis berjudul “ANALISIS AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH DALAM MASA PEMULIHAN EKONOMI PADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana kebijakan penyertaan modal negara yang berlaku pada PT Utama Karya?
- 2) Bagaimana praktik akuntansi investasi pemerintah atas PMN PEN pada PT Utama Karya?
- 3) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akuntansi investasi pemerintah untuk PT Utama Karya dengan standar akuntansi/peraturan yang berlaku ?
- 4) Bagaimana interpretasi investasi pemerintah pada kedua tahun anggaran dianalisis dari rasio keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Pembaca mengetahui kebijakan penyertaan modal negara yang berlaku pada PT Utama Karya.
- 2) Pembaca memahami praktik akuntansi investasi pemerintah atas PMN PEN pada PT Utama Karya.
- 3) Pembaca mampu menelaah kesesuaian pelaksanaan akuntansi investasi pemerintah untuk PT Utama Karya dengan standar akuntansi/peraturan yang berlaku.
- 4) Pembaca mampu menganalisis interpretasi investasi pemerintah pada kedua tahun anggaran menggunakan rasio keuangan.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup pada praktik akuntansi investasi pelaksana fungsi BA BUN 999.03 yakni pengelola investasi pada BUMN PT Utama Karya terutama dalam kaitannya dengan

pembiayaan untuk mendukung Program PEN akibat pandemi COVID-19 yang meliputi tahun anggaran 2020 dan 2021. Kementerian BUMN c.q. Sekretariat KBUMN berperan sebagai UAKPA BUN melaksanakan akuntansi dan pelaporan atas PMN pada PT Hutama Karya (Persero). Beberapa pembahasan menyangkut Kementerian Keuangan disertakan terkait sumber dana dan tata aturan akuntansi yang ditetapkan sehubungan dengan kewenangan Menteri Keuangan sebagai *ultimate shareholder* atas seluruh BUMN. Penulis hanya akan membahas penambahan investasi pemerintah pada PMN, tidak termasuk hasil investasinya (pengakuan bagian laba/kerugian pemerintah atas PMN pada BUMN). Penulis juga tidak membahas mengenai divestasi pada BUMN tersebut (jika ada).

Penulis kemudian akan menganalisis kesesuaiannya dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk memperoleh pemahaman atas transaksi dan posisi akun yang terlibat dalam kegiatan investasi tersebut. Di samping itu, penulis juga akan menambahkan beberapa analisis mengenai alokasi dana PMN PEN kedua tahun anggaran berdasarkan perubahan, efektivitas, dan subkomponen laporan keuangannya untuk membuktikan korelasi latar belakang dan konsekuensinya terhadap pemulihan ekonomi nasional.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangan gagasan dan bahasan kepada Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, dan PT Utama Karya (Persero) mengenai penerapan akuntansi investasi pemerintah serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan topik yang serupa.

## 2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis di bidang Akuntansi Pemerintah dan menjadi tantangan dengan standar hasil kerja yang tinggi sehingga pada akhirnya melatih penulis menjadi lebih tekun. Selain itu, harapan penulis agar tulisan ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan evaluasi atas praktik transaksi investasi pemerintah untuk pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, terdapat rangkaian subbab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini, penulis akan membahas standar dan teori dasar dari akuntansi investasi pemerintah berdasarkan SAIP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penulis akan menjabarkan penjelasan mengenai penyertaan modal negara dan Program PEN.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

#### 1) Metode Pengumpulan Data

## 2) Gambaran Umum Objek Penulisan

## 3) Pembahasan

Pada subbab ini, penulis akan melakukan analisis secara merinci terhadap rumusan masalah di atas dan korelasinya dengan program pemerintah untuk mewujudkan pemulihan ekonomi.

## BAB IV SIMPULAN